



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO

Jl. P Mastumapel No. 01 Bojonegoro (Gd. Pemkab Lt.3)



www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id



dinkominfo@bojonegorokab.go.id

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH **RENJA-PD**

2024



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BOJONEGORO
produktif



Pinarak
Bojonegoro



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. P. Mas Tumapel No. 1 Telp. (0353) 881826 (Hunting) Fax. 884893
Website : www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id
E-mail : dinkominfo@bojonegorokab.go.id
BOJONEGORO 62111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO**

NOMOR : 188/ 21/KEP/412.213/2024

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun perencanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika perlu menetapkan Keputusan tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun

- 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);
24. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 81);
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10.A Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 Nomor 10.A);
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris dan Kepala Bidang agar menjadikan Perubahan Rencana Kerja ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan pada Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 20 September 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO



SISWOYO, S.Pt.,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19760527 200112 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. P. Mas Tumapel No. 1 Telp. (0353) 881826 (Hunting) Fax. 884893

Website : www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id

E-mail : dinkominfo@bojonegorokab.go.id

BOJONEGORO 62111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 188/10/KEP/412.213/2024

TENTANG
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);
24. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 81);
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10.A Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 Nomor 10.A);
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Rancangan Akhir Renja Tahun 2024;
 - b. Menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bojonegoro;

- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.

KETIGA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro selaku Atasan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 10 Juli 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO



SISWOYO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760527 200112 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro
Nomor : 188/10/KEP/412.213/2024
Tanggal : 10 Juli 2024

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2024**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung jawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
3.	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4.	Anggota	a. Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik b. Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi c. Kabid Layanan <i>E-Government</i>

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO



SISWOYO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760527 200112 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 telah selesai disusun sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu Perubahan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, Rancangan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 dan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026, maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja (Renja-PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 yang berisikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dalam rangka menunjang pencapaian Rancangan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 ini diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro serta Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan



Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan sehingga berhasil menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja-PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 ini dengan baik.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

Bojonegoro, 20 September 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO



SISWOYO, S.Pt.,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19760527 200112 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD9	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	42
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	63
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	69
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	80
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	81
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	81
3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	81
3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi	84
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	85
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN.....	87
4.1. Program dan Kegiatan Tahun 2024	87
BAB V PENUTUP	99



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023	11
Tabel 2.2	Capaian Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2023 Misi 2 Tujuan 2.1 Sasaran 2.2	11
Tabel 2.3.	Hasil Capaian Renstra Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.....	12
Tabel 2.4.	Hasil Capaian Renstra Tahun 2023 (Review Menpan) Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro	13
Tabel 2.5.	Anggaran dan Tingkat Realisasi Tahun 2023	16
Tabel 2.6	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	30
Tabel 2.7.	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.....	47
Tabel 2.8.	Capaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023	59
Tabel 2.9	Review terhadap RKPD Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro.....	70
Tabel 2.10.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	80
Tabel 3.1	Sasaran dan Arah Kebijakan Nasional.....	81
Tabel 3.2	Strategi Nasional.....	82
Tabel 3.3	Program Prioritas Nasional	82
Tabel 3.4	Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2024	86
Tabel 4.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten4. Bojonegoro	91



BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahap penyusunan Renja-PD meliputi persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan Renja-PD. Penyusunan Renja-PD merupakan tahapan penyempurnaan setelah tersusunnya Rancangan Awal Renja-PD yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja-PD yang definitif.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro merupakan dokumen perencanaan PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024–2026.

RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024.

Selanjutnya Rancangan Akhir Renja-PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renja-PD definitif, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) definitif dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan



Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang kemudian aturan pelaksanaannya diuraikan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10.A Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026;



24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.



1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Berisi pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan dokumen RKPD, Renstra PD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Berisi penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan Lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Berisi kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu (Tahun 2023), dan hasil capaian Tahun berjalan (2024) mengacu pada APBD Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun



2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisi uraian mengenai :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap RKPD

Berisi uraian mengenai :

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Berisi perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan rumusan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

Berisi tentang penjelasan atas adanya ketidaksesuaian rumusan program dan kegiatan dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V P E N U T U P

Berisi uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU



2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Visi Kabupaten Bojonegoro yang tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023, yaitu: ***“Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing”***. Visi tersebut kemudian dituangkan ke dalam Misi.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian, mendukung Misi kedua pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023, yaitu ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab”*** bermakna peningkatan kinerja lembaga pemerintahan dan aparatur pemerintahan daerah maupun desa yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, profesional melalui reformasi birokrasi sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani.

Total Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp 14.943.689.129,00,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.760.522.018,00;
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 9.066.498.111,00; dan
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 116.669.000,00.

Dalam tahun berjalan, dibutuhkan penambahan anggaran sebesar Rp 4.214.535.439,00 rupiah. Penambahan anggaran pada perubahan APBD Tahun 2023 dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan antara lain:

- Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan yang meliputi video kegiatan standart, jasa penayangan di televisi, publikasi melalui media cyber, jasa pembuatan iklan layanan masyarakat, jasa iklan di media online, publikasi melalui radio dan publikasi media cetak;
- Belanja jasa tenaga ahli radio dan belanja hak penggunaan spektrum frekuensi radio (izin siaran radio);
- Serap aspirasi masyarakat dan literasi digital yang meliputi belanja makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber, uang saku kegiatan peserta, dan perjalanan dinas dalam daerah;
- Gathering bersama media dan pemangku kepentingan serta sosialisasi pencegahan hoax yang meliputi belanja makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber, uang saku kegiatan peserta, perjalanan dinas dalam daerah serta cetak buku;
- Publikasi melalui media non elektronik yang meliputi belanja cetak baliho, cetak spanduk, tagihan listrik dan internet videotron, dan belanja sewa space iklan baliho lokasi desa;
- Garansi server HCI dan lisensi firewall;
- Belanja jasa suvey kepuasan masyarakat, kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai dan pemeliharaan gedung insidentil; dan
- Penyesuaian TPP.

Sehingga anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro pada perubahan APBD Tahun 2023 menjadi Rp 19.158.224.568,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.042.984.406,00;
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 13.888.603.462,00; dan
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 226.636.700,00.

Sedangkan realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika di Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 15.889.503.530,00 atau 82,94%. Untuk lebih jelasnya mengenai realisasi berdasarkan jenis belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2023

NO	URAIAN	PAGU P-APBD (Rp.)	PELAKSANAAN		
			REALISASI KEUANGAN TERADAP PAGU P-APBD (Rp.)	CAPAIAN TERADA P PAGU P-APBD (%)	SISA TERADAP PAGU P-APBD (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	BELANJA OPERASI	18.931.587.868	15.672.498.530	82,78	3.259.089.338
	Belanja Pegawai	5.042.984.406	4.495.919.335	89,15	547.065.071
	Belanja Barang Jasa	13.888.603.462	11.176.579.195	80,47	2.712.024.267
2.	BELANJA MODAL	226.636.700	217.005.000	95,75	9.631.700
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	226.636.700	217.005.000	95,75	9.631.700
	TOTAL	19.158.224.568	15.889.503.530	82,94	3.268.721.038

Sedangkan realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 sebesar Rp 6.178.317.901,- atau sebesar 28,43%.

Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro didasarkan pada Capaian Renstra Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Capaian Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2022
Misi 2 Tujuan 2.1 Sasaran 2.2

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Kategori Capaian
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,20	3,65	114	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2022, Indeks SPBE pada

Tahun 2022 ditargetkan sebesar 2,74 (Baik) realisasi sebesar 2,65 (Baik), sehingga capaian kinerja sebesar 96,71% dengan kategori capaian **sangat tinggi**. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor penunjang keberhasilan antara lain, tersusunnya kebijakan internal SPBE dalam bentuk Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, tersusunnya perencanaan strategis dan tata kelola SPBE yang dituangkan dalam dokumen Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE, terbentuknya Tim Koordinasi SPBE, dan sudah ada kolaborasi penerapan SPBE, serta sebagian besar layanan administrasi dan layanan publik sudah terintegrasi dan sudah menggunakan aplikasi umum SPBE. Namun demikian, tetap akan dilakukan upaya peningkatan guna pencapaian target selanjutnya yang lebih baik, yakni dengan mengoptimalkan penerapan manajemen SPBE dan Audit TIK, penerapan SLA (Service Level Agreement) untuk layanan IT dan peningkatan kompetensi dan sertifikasi ASN di bidang TIK serta meminimalisir risiko negatif dengan penerapan manajemen risiko SPBE, dan memanfaatkan risiko positif untuk memberikan peluang keberhasilan pencapaian tujuan penerapan SPBE.

Tabel. 2.3.
Hasil Capaian Renstra Tahun 2023
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian
I.	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	3,20	3,65	114	Sangat Tinggi
1.	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPBE	100%	100%	100	Sangat Tinggi

2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan PD	1. Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	88,60	89,06	100,52	Sangat Tinggi
		2. Nilai IKM Dinas Komunikasi dan Informatika	91,60	91,54	99,93	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel 2.3 diatas dapat dilihat bahwa untuk capaian indikator tujuan Indeks SPBE ditargetkan sebesar 3,51 (Sangat Baik) realisasi sebesar 3,65 (Sangat Baik), sehingga capaian kinerja sebesar 104% dengan kategori capaian **sangat tinggi**. Sedangkan untuk indikator sasaran Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPBE tercapai 100% dengan kategori capaian **sangat tinggi**. Untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP, target yang ditetapkan sebesar 88,60 terealisasi sebesar 89,06, sehingga target yang ditetapkan tercapai 100,52% dengan kategori capaian **sangat tinggi**. Sedangkan untuk indikator sasaran Nilai IKM target yang ditetapkan sebesar 91,60 terealisasi sebesar 91,54 sehingga tingkat capaian target sebesar 99,93% dengan kategori capaian **sangat tinggi**.

Adapun target dan capaian indikator sasaran berdasarkan tupoksi sesuai urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Kemenpan dan RB, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4.
Hasil Capaian Renstra Tahun 2023 (Review Menpan)
Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2023			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian
1.	Meningkatnya implementasi SPBE pada Perangkat Daerah	Indeks Domain 1 – Kebijakan SPBE	3,90	4	102,56	Sangat Tinggi
		Indeks Domain 2 – Tata Kelola SPBE	3,00	3,3	110,00	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2023			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian
		Indeks Domain 3 – Manajemen SPBE	2,60	2,55	98,08	Sangat Tinggi
		Indeks Domain 4 – Layanan SPBE	3,51	4,13	117,66	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data	Laju Pemanfaatan Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data	10%	10,44%	104,40	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	520	520	100	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel 2.4 diatas, capaian indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Meningkatnya Implementasi SPBE pada Perangkat Daerah

Indikator Sasaran:

1) Indeks Domain 1 - Kebijakan Internal SPBE

Nilai Indeks Domain 1 - Kebijakan Internal SPBE di tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,90, terealisasi 4,00, dengan capaian 102,56% dan kategori capaian **sangat tinggi**. Capaian kinerja melebihi target karena adanya faktor penunjang keberhasilan yakni tersusunnya kebijakan internal SPBE dalam bentuk Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

2) Indeks Domain 2 - Tata Kelola SPBE

Nilai Indeks Domain 2 - Tata Kelola SPBE di tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,00, terealisasi 3,30, dengan capaian 110,00% dan kategori capaian **sangat tinggi**. Capaian kinerja melebihi target karena adanya beberapa faktor penunjang keberhasilan, diantaranya Arsitektur SPBE Kabupaten Bojonegoro telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional (Perpres Nomor 132 Tahun 2022) dan telah direview pada tahun

2023, Rencana Anggaran SPBE telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran serta telah di review dan dievaluasi oleh APIP Kabupaten, tersedianya Layanan Pusat Data (*Data Center*) yang terpadu dan pemanfaatan Layanan Pusat Data Nasional, serta adanya kolaborasi penerapan SPBE oleh Perangkat Daerah yang bersinergi bersama Dewan TIK yang terdiri dari Akademisi Perguruan Tinggi dan Komunitas TIK, dimana Dewan TIK adalah lembaga yang dibentuk secara formal dan ditetapkan dengan SK Bupati.

3) Indeks Domain 3 - Manajemen SPBE

Nilai Indeks Domain 3 - Manajemen SPBE di tahun 2023 ditargetkan sebesar 2,60, terealisasi sebesar 2,55, dengan capaian 98,08% dan kategori capaian **sangat tinggi**. Capaian kinerja masih belum memenuhi target, hal ini dikarenakan penerapan Manajemen SPBE masih kurang maksimal khususnya pada manajemen SDM, manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan, serta belum dilakukan audit TIK internal secara komprehensif melalui audit tools BRIN (infrastruktur dan aplikasi) dan audit keamanan.

4) Indeks Domain 4 - Layanan SPBE

Nilai Indeks Domain 4 - Layanan SPBE di tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,51, terealisasi 4,13, dengan capaian 117,66% dan kategori capaian **sangat tinggi**. Capaian kinerja melebihi target karena adanya faktor penunjang keberhasilan yakni sistem penghubung layanan telah dimanfaatkan secara optimal sehingga sebagian besar layanan administrasi dan layanan publik sudah terintegrasi.

2. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data

Indikator Sasaran:



1. Laju Pemanfaatan Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data

Laju Pemanfaatan Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data di tahun 2023 ditargetkan sebesar 10%, terealisasi 10,44%, dengan capaian 104,40% dan kategori capaian **sangat tinggi**. Realisasi tersebut melebihi target, seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung/visitor pada Portal Satu Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

3. Meningkatnya Keamanan Informasi

Indikator Sasaran:

1. Indeks KAMI

Indeks KAMI di tahun 2023 ditargetkan sebesar 520, terealisasi 502, dengan capaian 100% dan kategori capaian **sangat tinggi**. Capaian kinerja memenuhi target, hal ini dikarenakan adanya dukungan dari semua OPD untuk meningkatkan pengetahuan SDM tentang pentingnya keamanan informasi.

Tabel 2.5.
Anggaran dan Tingkat Realisasi Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pelaksanaan		
	Pagu P-APBD	Realisasi	Capaian (%)
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.172.515.197	5.470.563.289	88,63
1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.684.860	86.567.450	92,40
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.394.010	11.905.350	72,62
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.152.000	4.146.000	99,86
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	899.000	899.000	100,00
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	255.300	255.300	100,00
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	306.000	306.000	100,00
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.258.300	7.168.550	98,76

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pelaksanaan		
	Pagu P-APBD	Realisasi	Capaian (%)
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.420.250	61.887.250	96,07
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.038.895.906	4.493.500.835	89,18
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.791.034.406	4.274.429.393	89,22
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	243.602.000	214.875.942	88,21
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.259.500	4.195.500	98,50
1) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.210.000	10.240.000	77,52
a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.210.000	10.240.000	77,52
2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	113.648.500	98.495.700	86,67
a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.448.500	4.095.700	92,07
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	109.200.000	94.400.000	86,45
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	369.506.400	313.822.080	84,93
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.991.850	4.600.550	92,16
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.191.550	47.610.800	89,51
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.036.000	6.000.500	66,41
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.980.000	1.630.000	40,95
e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.605.000	5.350.000	81,00
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.240.000	41.715.000	92,21
g. Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.270.000	4.987.500	40,65
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.192.000	201.927.730	86,22
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.255.967	359.764.951	95,36
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.248.400	4.120.200	96,98
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.609.119	128.307.079	91,25
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.398.448	227.337.672	97,82
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.313.564	108.172.273	65,04
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.528.000	84.672.873	63,41
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.590.000	9.554.400	51,40

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pelaksanaan		
	Pagu P-APBD	Realisasi	Capaian (%)
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.195.564	13.945.000	98,23
2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	7.748.192.521	6.243.924.456	80,59
1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.748.192.521	6.243.924.456	80,59
a. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	72.835.550	72.392.079	99,39
b. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2.413.806.250	2.272.213.215	94,13
c. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	500.155.250	379.086.014	75,79
d. Pelayanan Informasi Publik	1.241.891.000	812.847.729	65,45
e. Layanan Hubungan Media	114.437.600	77.801.260	67,99
f. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	682.468.770	214.400.460	31,42
g. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	236.543.250	197.826.611	83,63
h. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	29.146.500	11.258.400	38,63
i. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.456.908.351	2.206.098.688	89,79
3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.473.215.350	3.741.022.609	83,63
1) Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.689.208.700	2.277.753.876	84,70
a. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.689.208.700	2.277.753.876	84,70
2) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.784.006.650	1.463.268.733	82,02
a. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	136.718.500	110.663.400	80,94
b. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	5.061.500	4.586.357	90,61
c. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	552.079.300	526.564.726	95,38
d. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	48.113.000	42.712.569	88,78
e. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	47.626.000	44.662.100	93,78
f. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	437.449.000	331.899.434	75,87

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pelaksanaan		
	Pagu P-APBD	Realisasi	Capaian (%)
g. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	155.332.950	139.551.360	89,84
h. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	137.039.500	121.831.760	88,90
i. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	120.794.000	55.741.027	46,15
j. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	143.792.900	85.056.000	59,15
URUSAN STATISTIK	222.893.500	98.875.926	44,36
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	222.893.500	98.875.926	44,36
1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	222.893.500	98.875.926	44,36
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	28.018.000	12.254.905	43,74
b. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	21.641.500	16.990.500	78,51
c. Membangun Metadata Statistik Sektoral	118.756.000	47.214.021	39,76
d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	53.803.000	21.763.000	40,45
e. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	675.000	653.500	96,81
URUSAN PERSANDIAN	541.408.000	335.117.250	61,90
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	541.408.000	335.117.250	61,90
1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	541.408.000	335.117.250	61,90
a. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	37.763.900	33.778.500	89,45
b. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	503.644.100	301.338.750	59,83
JUMLAH TOTAL	19.158.224.568	15.889.503.530	82,94

Dari tabel Hasil Capaian Renja dan Renstra Tahun 2023 kami uraikan sebagai berikut :

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Secara umum seluruh program/kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2023 telah memenuhi target kinerja hasil maupun keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indikator kinerja program :

Persentase layanan umum komunikasi dan informatika yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan, tercapai 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan :

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun selama satu tahun sejumlah 20 Dokumen, dengan tingkat realisasi kegiatan 100%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan :

Jumlah laporan keuangan yang disusun sejumlah 1 (satu) Dokumen, dengan tingkat realisasi kegiatan sebesar 100%.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan :

Jumlah dokumen pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) sejumlah 4 (empat) dokumen, dengan tingkat realisasi kegiatan sebesar 100%.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan :

Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang dikelola dengan target 5 (lima) layanan, dengan tingkat realisasi kegiatan sebesar 100%.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan :



Jumlah layanan administrasi umum yang tercukupi dengan target 8 (delapan) layanan, dengan tingkat realisasi kegiatan sebesar 100%.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja kegiatan :

Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan dengan target 3 (tiga) jenis, dengan tingkat realisasi kegiatan sebesar 100%.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja kegiatan:

Jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 3 (tiga) kali, dengan tingkat realisasi kegiatan sebesar 100%.

Secara umum seluruh kegiatan telah memenuhi target kinerja yang sesuai yang telah direncanakan, akan tetapi terdapat kegiatan yang realisasi anggarannya kurang maksimal namun demikian kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik dan target kinerjanya tercapai 100%, antara lain Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, hal ini dimungkinkan karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga adanya efisiensi di beberapa sub kegiatan.

Realisasi Anggaran setelah P-APBD:

Pagu P-APBD	Realisasi		Sisa Anggaran
1	2		3 = (1 - 2)
6.172.515.197,-	5.470.563.289,-	88,63%	701.951.908,-

2) Program Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator kinerja program:

Persentase Desa/Kelurahan penerima informasi dan komunikasi publik Elektronik, tercapai 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja kegiatan:

Jumlah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten 1000 Kegiatan, tingkat realisasi kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, dengan indikator Jumlah dokumen hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 1 (satu) dokumen, dengan tingkat capaian target 100%.
- 2) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, dengan indikator Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan jumlah perencanaan media komunikasi publik sebanyak 12 (dua belas) dokumen dengan tingkat capaian target 100%.
- 3) Pengelolaan Media Komunikasi Publik, dengan indikator Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan Media Komunikasi Publik sebanyak 12 (dua belas) dokumen, dengan tingkat capaian target 100%.
- 4) Pelayanan Informasi Publik, dengan indikator Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik sebanyak 35 (tiga puluh lima) dokumen dengan tingkat capaian target 100%.
- 5) Layanan Hubungan Media, dengan indikator Jumlah layanan hubungan media sebanyak 7 (tujuh) layanan, dengan tingkat capaian target 100%.
- 6) Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dengan indikator Jumlah dokumen kemitraan dengan pemangku



kepentingan sejumlah 14 (empat belas) dokumen, dengan tingkat capaian target 100%.

- 7) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, dengan indikator jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat kapasitasnya sebanyak 200 orang, dengan tingkat capaian target 100%.
- 8) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, dengan indikator jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam diseminasi Informasi program atau kebijakan sejumlah 4 (empat) dokumen, dengan tingkat capaian target 100%.
- 9) Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik yang tersedia sebanyak 140 unit, dengan tingkat capaian target 100%.

Capaian indikator-indikator tersebut diikuti kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian Sub Kegiatan	Target	Capaian Kinerja
1.	Pengelolaan opini dan aspirasi melalui aplikasi SIAP LAPOR	12 bulan	100,00%
2.	Cetak Buku Laporan Tahunan	25 Buah	100,00%
3.	Publikasi melalui berbagai media (media online/cyber, website, majalah warta, koran regional, media sosial, elektronik, televisi, siaran Radio Malowopati FM 19 jam/hari)	677 kali	100,00%
4.	Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio	2 Unit	100,00%
5.	Pemeliharaan videotron	4 kegiatan	100,00%
6.	Listrik dan Bandwidth Videotron	12 bulan	100,00%
7.	Pengadaan PC	2 unit	100,00%

Realisasi Anggaran setelah P-APBD:

Pagu P-APBD	Realisasi		Sisa Anggaran
1	2		3 = (1 - 2)
7.748.192.521,-	6.243.924.456,-	80,59%	1.504.268.065,-

3) Program Aplikasi Informatika

Indikator kinerja program:

Persentase OPD yang telah memiliki Sistem Informasi sesuai standar, tercapai 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah OPD yang telah mengelola sub domain sesuai dengan Permen Kominfo 70 OPD, dengan tingkat realisasi kegiatan sebesar 100%. Rincian sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, indikator program berupa Jumlah system jaringan Intra Pemerintah Daerah sebanyak 70 unit, dengan capaian target 100%.

- b) Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro

Indikator kinerja kegiatan :

Jumlah OPD yang telah mengelola *e-government* sebanyak 70 OPD, dengan tingkat realisasi kegiatan sebesar 100%. Rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penatalaksanaan dan Pengawasan *e-government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan E-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sejumlah 1 (satu) dokumen, dengan tingkat capaian target 100%;

- 2) Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik, dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik sebanyak 1 (satu) dokumen dengan tingkat capaian target 100%;
- 3) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah, dengan indikator Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola sebanyak 41 unit, dengan tingkat capaian target 100%;
- 4) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah sebanyak 12 dokumen, dengan tingkat capaian target 100%;
- 5) Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik, dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik sebanyak 3 Perangkat Daerah, dengan tingkat capaian target 100%;
- 6) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan indikator Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan sejumlah 5 unit aplikasi, dengan capaian target sebesar 100%;
- 7) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, dengan indikator Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebanyak 2 (dua) layanan, dengan tingkat capaian target 100%;
- 8) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas, dengan indikator Jumlah



pengelolaan pengembangan Smart City 1 (satu) dokumen dengan tingkat capaian target 100%;

9) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, dengan indikator Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City sebanyak 1 (satu) dokumen, dengan tingkat capaian target 100%;

10) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE, dengan indikator Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE sebanyak 1 (satu) dokumen, dengan tingkat capaian target 100%.

Capaian indikator-indikator tersebut diikuti kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian Sub Kegiatan	Target	Capaian Kinerja
1.	Penyediaan bandwidth internet up to 100 Mbps	4 bulan	100,00%
2.	Penyediaan bandwidth internet up to 400 Mbps	12 bulan	100,00%
3.	Penyediaan bandwidth internet up to 600 Mbps	12 bulan	100,00%
4.	Iuran IP Adress	1 tahun	100,00%
5.	Bandwidth internet Fiber Optic Metro	12 bulan	100,00%
6.	Sewa aplikasi <i>zoom meeting</i>	11 bulan	100,00%
7.	Pemeliharaan jaringan komputer	7 Kegiatan	100,00%
8.	Pemeliharaan Jaringan Wireless	3 Kegiatan	100,00%
9.	Pemeliharaan NOC	1 Kegiatan	100,00%
10.	Sewa virtual machine server	12 bulan	100,00%

No	Uraian Sub Kegiatan	Target	Capaian Kinerja
11.	Pemeliharaan dan Penggantian komponen Data Center	3 kali	100,00%
12.	Sewa Peralatan Mainframe	12 bulan	100,00%
13.	Pengadaan Laptop	2 unit	100,00%
14.	Sewa domain desa.id	419 desa	100,00%

Realisasi Anggaran setelah P-APBD:

Pagu P-APBD	Realisasi		Sisa Anggaran
1	2		3 = (1 - 2)
4.473.215.350,-	3.741.022.609,-	83,63 %	732.192.741,-

4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Indikator kinerja program :

Persentase data dan statistik sektoral yang dikelola dengan baik 100,00%, dengan tingkat capaian 100,00%.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

a) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja kegiatan :

Jumlah Data Sektoral yang dikumpulkan 40 sektor, dengan tingkat capaian 100,00%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, dengan indikator berupa Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral sebanyak 3 (tiga) dokumen, dengan tingkat capaian target 100%;
- 2) Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, dengan indikator Jumlah SDM yang Meningkat

Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi sebanyak 43 orang, dengan tingkat capaian target 100%;

- 3) Membangun Metadata Statistik Sektoral, dengan indikator target Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun sejumlah 20 dokumen, dengan tingkat capaian target 100%;
- 4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral, dengan indikator target Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS sebanyak 43 orang dengan tingkat capaian target 100%;
- 5) Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Daerah, dengan indikator target Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun sejumlah 43 dokumen, dengan tingkat capaian target 100%.

Target kegiatan dan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Uraian Sub Kegiatan	Target	Capaian Kinerja
1.	Rapat Koordinasi Data	1 kali	100,00%
2.	Evaluasi Data	1 kali	100,00%
3.	Koordinasi/studi banding	3 kali	100,00%

Realisasi Anggaran setelah P-APBD:

Pagu P-APBD	Realisasi		Sisa Anggaran
1	2		3 = (1 - 2)
222.893.500,-	98.875.926,-	44,36 %	124.017.574,-

5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Indikator kinerja program :

Persentase OPD yang datanya terlindungi sistem pengamanan 100,00%, dengan tingkat capaian 100,00%.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja kegiatan :

Jumlah OPD yang datanya terlindungi sistem pengamanan 70 OPD, dengan tingkat capaian 100,00%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 2 laporan, dan terlaksana 100%;
- 2) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi sebanyak 70 OPD, dengan tingkat capaian target 100%.

Target kegiatan dan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Uraian Sub Kegiatan	Target	Capaian Kinerja
1.	Belanja software aplikasi tahunan <i>lincense firewall</i>	1 unit	100,00%
2.	Belanja software aplikasi tahunan <i>lincense proxy server</i>	1 unit	100,00%
3.	Sewa SSL (<i>Secure Socket Layer</i>)	1 tahun	100,00%

Realisasi Anggaran setelah P-APBD:

Pagu P-APBD	Realisasi		Sisa Anggaran
1	2		3 = (1 - 2)
541.408.000,-	335.117.250,-	61,90%	206.290.750,-

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Renstra PD s/d Tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target Renstra Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan umum Komunikasi dan Informatika yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja PD yang sesuai Pedoman	100%					100%	100%	100%
		Persentase Layanan Administrasi Umum, Administrasi Kepegawaian, Administrasi BMD dan Administrasi Keuangan sesuai SOP	100%					100%	100%	100%
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun selama satu tahun	54 Dokumen	54 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	18 Dokumen	18 Dokumen	100%
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun	21 Dokumen	19 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-OPD	Jumlah Koordinasi yang dilakukan.	-	4 Kali	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen RKA-OPD yang disusun	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	-	3 Kali	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-OPD	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Restra PD Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target Restra Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	--	1 Kali	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen DPA-OPD yang disusun	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-OPD	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	-	1 Kali	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	-	4 Kali	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang disusun	-	16 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 laporan	36 laporan	17 Laporan	17 Laporan	100%	16 Laporan	16 laporan	100%
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	9 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya tersedia	-	36 Orang	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Restra PD Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target Restra Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Org/bln	42 Org/bln	444 Org/bln	427 Org/bln	96,17%	36 Org/bln	36 Org/bln	100%
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	Jumlah pelaksana penatausahaan keuangan yang tersedia honornya	-	22 Orang	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pengurus barang yang tersedia honornya	-	1 Orang	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	882 Dokumen	324 Dokumen	312 Dokumen	312 Dokumen	100%	285 Dokumen	285 Dokumen	100%
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	11 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadministrasian BMD	12 Dokumen	10 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada OPD	Jumlah Laporan rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100%	20 Laporan	20 Laporan	100%
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun	-	12 Lap	-	-	-	-	-	100%
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang dikelola	15 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	100%	5 Layanan	5 Layanan	100%
2.16.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan kepegawaian	-	36 Orang	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36 Dokumen	17 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	-	1 Kali	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	62 Org	42 Org	30 Org	30 Org	100%	56 Org	56 Org	100%

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Restra PD Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target Restra Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilakukan	-	3 Kali	-	-	-	-		
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tercukupi	21 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	100%	7 Layanan	7 Layanan	100%
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	7 Komponen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	6 Jenis	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	6 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	-	5 Jenis	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang Disediakan	-	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	-	-	-
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	5000 Lbr	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	432 Eksp	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	960 Dokumen	504 Dokumen	144 Dokumen	144 Dokumen	100%	360 Dokumen	360 Dokumen	100%
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	-	24 Kali	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Jumlah makmin rapat yang disediakan	-	600 Kotak	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Restra PD Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target Restra Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	-	16 Kali	-	-	-	-		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan	60 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100%	36 Laporan	36 Laporan	100%
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	9 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	-	144 Kali	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan rekening telepon dan listrik yang disediakan	-	72 Kali	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	39 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	13 Laporan	13 Laporan	100%
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa penunjang kegiatan Harkitnas	-	1 Kali	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	42 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	14 Laporan	14 Laporan	100%
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	7 Kali	72 Kali	3 Kali	3 Kali	100%	3 Kali	3 Kali	100%
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	72 Unit	24 Unit	-	-	-	24 Unit	24 Unit	100%
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	48 Unit	24 Unit	24 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	59 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	-	-	-

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Restra PD Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target Renstra Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	-	18 Jenis	-	-	-	-	-	-
2.16.02.2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Desa/Kelurahan penerima informasi dan komunikasi publik		100%	100%	100%	100%	-	-	-
		Cakupan publikasi informasi melalui media cetak dan media elektronik	90%	451 Kegiatan				80%	80%	100%
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten	1500 Kegiatan	-	1000 Kegiatan	1000 Kegiatan	100%	1000 Kegiatan	1000 Kegiatan	100%
		Jumlah Pengaduan dan aspirasi publik yang ditindaklanjuti sesuai SOP	360 Pengaduan	-	-	-	-	120 Pengaduan	120 Pengaduan	100%
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	-	0,7143 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah kegiatan pengelolaan konten dan jumlah perencanaan media komunikasi publik	-	55 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	36 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah desa/kelurahan penerima diseminasi informasi dan iklan layanan masyarakat (ILM) melalui media radio dan televisi	-	325 Desa/ Kelurahan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	36 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah penyampaian informasi publik dari Kepala Daerah kepada Masyarakat melalui Sambang Desa dan Public Space	-	5 Kegiatan	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Restra PD Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target Restra Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	85 Dokumen	32 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	100%	45 Dokumen	45 Dokumen	100%
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah pengelolaan media pelayanan informasi publik	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Layanan Hubungan Media	-	14 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	100%	-	-	-
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kegiatan sinkronasi Forum Koordinasi Pewarta Komunikasi Publik	-	4 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen Kemitraan dengan pemangku kepentingan	-	8 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	-	-	-
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah TPID/KIM aktif yang dibina dan dikembangkan	-	161 TPID/KIM Aktif	-	-	-	-	-	-
		Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	500 Orang	400 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	300 Orang	300 Orang	100%
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-	4 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	16 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik yang tersedia	-	12 Paket	-	-	-	-	-	-
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	18 unit	168 unit	140 Unit	140 Unit	100%	18 Unit	18 unit	100%
2.16.03	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang telah memiliki Sistem Informasi sesuai standar		100%	100%	100%	100%	-	-	-
		Cakupan pemanfaatan aplikasi informatika oleh Perangkat Daerah	100%					100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target Renstra Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Jaminan Kualitas Layanan TIK (<i>Service Level Agreement</i>)	77%					73%	73%	100%
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah mengelola sub domain sesuai dengan Permen Kominfo	70 OPD	70 OPD	70 OPD	70 OPD	100%	70 OPD	70 OPD	100%
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan intranet	-	70 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	70 Unit	70 Unit	70 Unit	70 Unit	100%	70 Unit	70 Unit	100%
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah mengelola e- government	-	70 OPD	70 OPD	70 OPD	100%	-		
		Jumlah OPD yang terlayani Pusat Data	73 OPD					73 OPD	73 OPD	100%
		Jumlah Sistem informasi yang diintegrasikan	3 layanan					1 Layanan	1 Layanan	100%
		Jumlah Dokumen evaluasi mandiri SPBE	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penatalaksanaan dan pengawasan e-government	-	12 Kali	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah kegiatan sinkronisasi untuk peningkatan capaian SPBE	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan nggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Restra PD Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target Restra Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang melakukan transaksi data secara dinamis	-	70 OPD	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	41 Unit	41 Unit	41 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	-	70 OPD	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	36 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah kegiatan koordinasi, sinkronisasi data dan informasi elektronik	-	2 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah perangkat daerah yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	-	8 OPD	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	100%	-	-	-
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	-	12 Aplikasi	-	-	-	-	-	-
		Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	7 Unit	11 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah penyelenggaraan sistem penghubung layanan yang tersedia	-	4 Sistem	-	-	-	-	-	-
		Jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	3 Layanan	4 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah pengelolaan pengembangan Smart City	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Restra PD Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target Restra Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah SDM TIK yang mengikuti pelatihan peningkatan mutu	-	500 Orang	-	-	-	-		-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	-	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	--	-
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah monev dan pelaporan pengembangan SPBE Kabupaten Bojonegoro	-	2 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.20.02	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data dan statistik sektoral yang dikelola dengan baik		100%	100%	100%	100%			
		Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral pada Portal Satu Data	100%	40 Sektor				100%	100%	100%
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sektoral yang dikumpulkan			40 Sektor	40 Sektor	100%		-	100%
		Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan Sesuai Standar Data	450 Data					400 Data	400 data	100%
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral		3 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	9 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam	Jumlah pelatihan/bimtek peningkatan mutu statistik daerah	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Restra PD Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target Restra Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi									
		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	-	43 Orang	43 Orang	43 Orang	100%	-	-	-
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah pembangunan metadata statistik sektoral	-	4 Sektoral	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	-	40 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	-	-	-
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang telah mendapatkan pembinaan kapasitas kelembagaan Statistik Sektoral	-	70 OPD	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	-	43 Orang	43 Orang	43 Orang	100%	-	-	-
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	-	2 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	-	86 Dokumen	43 Dokumen	43 Dokumen	100%	-	-	-
2.21.02	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang datanya terlindungi sistem pengamanan	75%	10%	100%	100%	100%	65%	65%	100%
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang datanya terlindungi sistem pengamanan	70 OPD	70 OPD	70 OPD	70 OPD	100%	70 OPD	70 OPD	100%
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggara-an bimtek persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	-	1 Kali Bimtek	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target Renstra Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang tercover layanan keamanan informasi dan persandian daerah	-	70 OPD	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	70 OPD	70 OPD	70 OPD	70 OPD	100%	70 OPD	70 OPD	100%





2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir masa periode RPJMD, untuk menghitung analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 diperlukan data valid dari realisasi kinerja Tahun 2023, sampai dengan Rencana Kerja ini disusun, telah dihitung realisasi kinerja dan realisasi capaian Target Renstra PD s.d akhir Desember Tahun 2023, serta realisasi capaian sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024.

Hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023, secara umum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan rata-rata kategori capaian **sangat tinggi**. Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian 6 (enam) indikator sasaran yang ada, yaitu 4 (empat) tercapai dengan kategori sangat tinggi dan 2 (dua) tercapai dengan kategori sedang. Adapun capaian realisasi anggaran sebesar 82,94% atau sebesar Rp 15.889.503.530,- dari total anggaran Rp 19.158.224.568,-.

Adapun capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022, beserta realisasi anggarannya adalah sebagai berikut:

1. Sasaran **“Meningkatnya Implementasi SPBE pada Perangkat Daerah”**

Diukur menggunakan 4 (empat) indikator sasaran, dengan realisasi 2 (dua) indikator tercapai dengan kategori capaian **sangat tinggi** dan 2 (dua) indikator tercapai dengan kategori capaian **sedang**.

Indikator Sasaran 1 s.d 4, sebagai berikut:

1) **Indeks Domain 1 - Kebijakan Internal SPBE**

Nilai Indeks Domain 1 - Kebijakan Internal SPBE di tahun 2022 ditargetkan sebesar 3, terealisasi 3,10, dengan capaian 103,33% dan kategori capaian **sangat tinggi**. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan internal SPBE dalam

bentuk Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

2) Indeks Domain 2 - Tata Kelola SPBE

Nilai Indeks Domain 2 - Tata Kelola SPBE di tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,00, terealisasi 3,30, dengan capaian 110% dan kategori capaian **sangat tinggi**. Capaian kinerja melebihi target karena adanya beberapa faktor penunjang keberhasilan, diantaranya Arsitektur SPBE Kabupaten Bojonegoro telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional (Perpres Nomor 132 Tahun 2022) dan telah direview pada tahun 2023, Rencana Anggaran SPBE telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran serta telah di review dan dievaluasi oleh APIP Kabupaten, tersedianya Layanan Pusat Data (*Data Center*) yang terpadu dan pemanfaatan Layanan Pusat Data Nasional, serta adanya kolaborasi penerapan SPBE oleh Perangkat Daerah yang bersinergi bersama Dewan TIK yang terdiri dari Akademisi Perguruan Tinggi dan Komunitas TIK, dimana Dewan TIK adalah lembaga yang dibentuk secara formal dan ditetapkan dengan SK Bupati.

3) Indeks Domain 3 - Manajemen SPBE

Nilai Indeks Domain 3 - Manajemen SPBE di tahun 2023 ditargetkan sebesar 2,60, terealisasi 2,55, dengan capaian 98% dan kategori capaian **sangat tinggi**. Capaian kinerja masih belum memenuhi target, hal ini dikarenakan penerapan Manajemen SPBE masih kurang maksimal khususnya pada manajemen SDM, manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan, serta belum dilakukan audit TIK internal secara komprehensif melalui



audit tools BRIN (infrastruktur dan aplikasi) dan audit keamanan.

4) Indeks Domain 4 - Layanan SPBE

Nilai Indeks Domain 4 - Layanan SPBE di tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,51, terealisasi 4,13, dengan capaian 118% dan kategori capaian **sangat tinggi**. Capaian kinerja melebihi target karena adanya faktor penunjang keberhasilan yakni sistem penghubung layanan telah dimanfaatkan secara optimal sehingga sebagian besar layanan administrasi dan layanan publik sudah terintegrasi.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran ini adalah sebesar Rp 3.344.889.370,- kemudian dilakukan perubahan pada P-APBD menjadi Rp 7.748.192.521,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.243.924.456,- (80,59%).

2. Sasaran “Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data”

Diukur menggunakan Indikator Sasaran:

1. Laju Pemanfaatan Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data

Laju Pemanfaatan Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data di tahun 2023 ditargetkan sebesar 10%, terealisasi 10,44%, dengan capaian 104% dan kategori capaian **sangat tinggi**. Realisasi tersebut melebihi target, seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung/visitor pada Portal Satu Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di tahun 2023.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut di atas adalah sebesar Rp 341.908.000,- dilakukan perubahan pada P-APBD menjadi Rp 222.893.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 98.875.926,- (44,36%).

3. Sasaran “Meningkatnya Keamanan Informasi”

Diukur menggunakan Indikator Sasaran:

1. Indeks KAMI

Indeks KAMI di tahun 2023 ditargetkan sebesar 520, terealisasi 520, dengan capaian 100% dan kategori capaian **sangat tinggi**. Capaian kinerja masih telah memenuhi target, hal ini dikarenakan adanya dukungan dari semua OPD untuk meningkatkan pengetahuan SDM tentang pentingnya keamanan informasi.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 341.908.000,- dilakukan perubahan pada P-APBD menjadi Rp 541.408.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 335.117.250,- (61,90%).

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 secara umum tercapai dengan kategori capaian **sangat tinggi**, dan bila dikaitkan dengan Indikator Sasaran pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung Misi 2, Tujuan 2.1, Sasaran 2.2, yaitu “Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Perangkat Daerah” yang diukur menggunakan indikator “**Indeks SPBE**”.

Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2022 dengan menggunakan instrument sebagaimana telah diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 59 tahun 2020, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 adalah sebesar 2,65, dengan predikat “Baik”. Sedangkan target Indeks SPBE tahun 2022 adalah sebesar 2,74, sehingga capaiannya adalah 96,7% dengan kategori capaian **sangat tinggi**.

Jadi dapat disimpulkan, kategori capaian dari indikator sasaran RPJMD “Indeks SPBE” adalah sangat tinggi dan bila dibandingkan dengan realisasi Indeks SPBE tahun 2021, Indeks SPBE tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,2.



Pada tahun 2023 Dinas Kominfo melaksanakan 5 (lima) program, 12 kegiatan dan 54 Sub Kegiatan. Rekapitulasi analisis pencapaian kinerja pelayanan PD dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini :



Tabel 2.7.
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun			Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Desa/Kelurahan penerima informasi dan komunikasi publik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten				451 Kegiatan	451 Kegiatan	1000 Kegiatan	435 Kegiatan	451 Kegiatan	1000 Kegiatan	96,45%	100%	100%	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				1 Kegiatan	-	-	0,7143 Kegiatan	-	-	71,43%	-	-	
		Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik				-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	100%	100%	
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah kegiatan pengelolaan konten dan jumlah perencanaan media komunikasi publik				55 Kegiatan	-	-	55 Kegiatan	-	-	100%	-	-	
		Jumlah dokumen Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				-	12 Dokumen	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	-	100%	100%	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah desa/kelurahan penerima diseminasi informasi dan iklan layanan masyarakat (ILM) melalui media radio dan televisi				325 Desa/Kelurahan	-	-	325 Desa/Kelurahan	-	-	100%	-	-	
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				-	12 Dokumen	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	-	100%	100%	

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun			Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah penyampaian informasi publik dari Kepala Daerah kepada Masyarakat melalui Sambang Desa dan Public Space				18 Kegiatan	-	-	5 Kegiatan	-	-	27,78%	-	-	
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik				-	12 Dokumen	35 Dokumen		12 Dokumen	35 Dokumen	-	100%	100%	
	Layanan Hubungan Media	Jumlah pengelolaan media pelayanan informasi publik				1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Layanan Hubungan Media				-	7 Layanan	7 Layanan	-	7 Layanan	7 Layanan	-	100%	100%	
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kegiatan sinkronasi Forum Koordinasi Berita Komunikasi Publik				4 Kegiatan	-	-	4 Kegiatan	-	-	100%	-	-	
		Jumlah dokumen Kemitraan dengan pemangku kepentingan				-	4 Dokumen	14 Dokumen	-	4 Dokumen	14 Dokumen	-	100%	100%	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah TPID/KIM aktif yang dibina dan dikembangkan				161 TPID/KIM Aktif	-	-	161 TPID/KIM Aktif	-	-	100%	-	-	
		Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya				-	200 Orang	200 Orang	-	200 Orang	200 Orang	-	100%	100%	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				4 Kegiatan	-	-	4 Kegiatan	-	-	100%	-	-	
		Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan				-	4 Dokumen	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	-	100%	100%	
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik yang tersedia				12 Paket	-	-	12 Paket	-	-	100%	-	-	

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun			Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota				-	84 Unit	140 Unit	-	84 Unit	140 unit	-	100%	100%	
	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang telah memiliki Sistem Informasi sesuai standar				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah mengelola sub domain sesuai dengan Permen Kominfo				70 OPD	70 OPD	70 OPD	70 OPD	70 OPD	70 OPD	100%	100%	100%	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan intranet				70 Kegiatan	-	-	70 Kegiatan	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				-	70 Unit	70 Unit	-	70 Unit	70 Unit	-	100%	100%	
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah mengelola e-government				70 OPD	70 OPD	70 OPD	70 OPD	70 OPD	70 OPD	100%	100%	100%	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penatalaksanaan dan pengawasan e-government				12 Kali	-	-	12 Kali	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	100%	100%	
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah kegiatan sinkronisasi untuk peningkatan capaian SPBE				1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan				-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	100%	100%	

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun			Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		nggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik													
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang melakukan transaksi data secara dinamis				70 OPD	-	-	70 OPD	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				-	41 Unit	41 Unit	-	41 Unit	41 Unit	-	100%	100%	
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				70 OPD	-	-	70 OPD	-	-	100%	-	-	
		Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan system komunikasi intra pemerintah daerah				-	12 Dokumen	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	-	100%	100%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah kegiatan koordinasi, sinkronisasi data dan informasi elektronik				2 Kegiatan	-	-	2 Kegiatan	-	-	100%	-	-	
		Jumlah perangkat daerah yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik				-	5 OPD	3 OPD	-	5 OPD	3 OPD	-	100%	100%	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan				12 Aplikasi	-	-	12 Aplikasi	-	-	100%	-	-	
		Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan				-	6 Unit	5 Unit	-	6 Unit	5 Unit	-	100%	100%	
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah penyelenggaraan sistem penghubung layanan yang tersedia				4 Sistem	-	-	4 Sistem	-	-	100%	-	-	
		Jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah				-	2 Layanan	2 Layanan	-	2 Layanan	2 Layanan	-	100%	100%	
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah pengelolaan pengembangan Smart City				1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	-	-	100%	-	-	

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun			Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city				-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	100%	100%	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah SDM TIK yang mengikuti pelatihan peningkatan mutu				500 Orang	-	-	500 Orang	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	100%	100%	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah monev dan pelaporan pengembangan SPBE Kabupaten Bojonegoro				2 Kegiatan	-	-	2 Kegiatan	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Dokumen monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	100%	100%	
	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data dan statistik sektoral yang dikelola dengan baik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sektoral yang dikumpulkan				40 Sektor	40 Sektor	40 Sektor	40 Sektor	40 Sektor	40 Sektor	100%	100%	100%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral				3 Kegiatan	-	-	3 Kegiatan	-	-	100%	-	-	
		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral				-	3 Dokumen	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	-	100%	100%	
	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah pelatihan/bimtek peningkatan mutu statistik daerah				1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	-	-	100%	-	-	
		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				-	43 Orang	43 Orang	-	43 Orang	43 Orang	-	100%	100%	

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun			Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah pembangunan metadata statistik sektoral				4 Sektoral	-	-	4 Sektoral	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				-	20 Dokumen	20 Dokumen	-	20 Dokumen	20 Dokumen	-	100%	100%	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang telah mendapatkan pembinaan kapasitas kelembagaan Statistik Sektoral				70 OPD	-	-	70 OPD	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				-	43 Orang	43 Orang	-	43 Orang	43 Orang	-	100%	100%	
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah				2 Kegiatan	-	-	2 Kegiatan	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun				-	43 Dokumen	43 Dokumen	-	43 Dokumen	43 Dokumen	-	100%	100%	
	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang datanya terlindungi sistem pengamanan				100%	100%	100%	10%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang datanya terlindungi sistem pengamanan				70 OPD	70 OPD	70 OPD	70 OPD	70 OPD	70 OPD	100%	100%	100%	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggara-an bimtek persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten				1 Kali Bimtek	-	-	1 Kali Bimtek	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	-	100%	100%	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang tercover layanan keamanan informasi dan persandian daerah				70 OPD	-	-	70 OPD	-	-	100%	-	-	

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun			Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				-	70 OPD	70 OPD	-	70 OPD	70 OPD	-	100%	100%	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD				88,44	88,50	88,60	88,44	88,51	89,06	100%	100,01%	100,52	
		Nilai IKM				91,41	91,50	91,60	91,41	91,81	91,54	100%	100,34%	99,93%	
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan umum Komunikasi dan Informatika yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun selama satu tahun				18 Dokumen	18 Dokumen	20 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	20 Dokumen	100%	100%	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun				7 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	100%	100%	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-OPD	Jumlah Koordinasi yang dilakukan.				4 Kali	-	-	4 Kali	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Dokumen RKA-OPD yang disusun				1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	100%	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD	Jumlah Koordinasi yang dilakukan				3 Kali	-	-	3 Kali	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-OPD				1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	100%	100%	

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun			Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD	Jumlah Koordinasi yang dilakukan				1 Kali	-	-	1 Kali	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Dokumen DPA-OPD yang disusun				1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-	100%	-	-	
		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	100%	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-OPD	Jumlah Koordinasi yang dilakukan				1 Kali	-	-	1 Kali	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Perubahan DPA-OPD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Koordinasi yang dilakukan				4 Kali	-	-	4 Kali	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang disusun				16 Dokumen	-	-	16 Dokumen	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	3 Laporan	3 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	-	100%	100%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 laporan	16 Laporan	17 Laporan	4 laporan	16 Laporan	17 Laporan	100%	100%	100%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya tersedia				36 Orang	-	-	36 Orang	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	42 Org/bln	444 Org/bln	-	36 Org/bln	427 Org/bln	-	86%	96,17%	

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun			Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	Jumlah pelaksana penatausahaan keuangan yang tersedia honornya				22 Orang	-	-	22 Orang	-	-	100%	-	-	
		Jumlah pengurus barang yang tersedia honornya				1 Orang	-	-	1 Orang	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				-	12 Dokumen	312 Dokumen	-	12 Dokumen	312 Dokumen	-	100%	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-	5 Laporan	6 Laporan	-	5 Laporan	6 Laporan	-	100%	100%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadministrasian BMD				4 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	100%	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada OPD	Jumlah Laporan rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	2 Laporan	20 Laporan	-	2 Laporan	20 Laporan	100%	100%	100%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun				12 Lap	-	-	12 Lap	-	-	100%	-	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang dikelola				5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	100%	100%	100%	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan kepegawaian				36 Orang	-	-	36 Orang	-	-	100%	-	-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				-	12 Dokumen	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	-	100%	100%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan				1 Kali	-	-	1 Kali	-	-	100%	-	-	
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				-	42 Org	30 Org	-	69 Org	30 Org	-	164%	100%	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilakukan				3 Kali	-	-	3 Kali	-	-	100%	-	-	

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun			Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tercukupi				8 Layana n	8 Layana n	8 Layana n	8 Layana n	8 Laya nan	8 Layana n	100%	100%	100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan				7 Kompon en	-	-	7 Kompon en	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	-	100%	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				6 Jenis	-	-	6 Jenis	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	3 Paket	3 Paket	-	3 Paket	3 Paket	-	100%	100%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	4 Paket	1 Paket	-	4 Paket	1 Paket	-	100%	100%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan				5 Jenis	-	-	5 Jenis	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang Disediakan				-	4 Paket	1 Paket	-	4 Paket	1 Paket	-	100%	100%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				5000 Lbr	-	-	5000 Lbr	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				-	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	-	100%	100%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				432 Eksp	-	-	432 Eksp	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				-	132 Dokume n	144 Dokume n	-	132 Doku men	144 Dokume n	-	100%	100%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				24 Kali	-	-	24 Kali	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				-	4 Laporan	3 Laporan	-	4 Lapor an	3 Laporan	-	100%	100%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Jumlah makmin rapat yang disediakan				600 Kotak	-	-	600 Kotak	-	-	100%	-	-	

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun			Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah				16 Kali	-	-	16 Kali	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	12 Laporan	48 Laporan	-	12 Laporan	48 Laporan	-	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan				3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan				144 Kali	-	-	144 Kali	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	12 laporan	12 laporan	-	12 laporan	12 Laporan	-	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan rekening telepon dan listrik yang disediakan				72 Kali	-	-	72 Kali	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	-	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa penunjang kegiatan Harkitnas				1 Kali	-	-	1 Kali	-	-	100%	-	-	
		Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				-	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	-	100%	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah				24 Kali	24 Kali	3 Kali	24 Kali	24 Kali	3 Kali	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan dan pengurusan perijinan				24 Unit	-	-	24 Unit	-	-	100%	-	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	24 Unit	24 Unit	-	24 Unit	24 Unit	-	100%	100%	

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun			Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				35 Unit	16 Unit	20 Unit	35 Unit	16 Unit	20 Unit	100%	100%	100%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara				1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	100%	-	100%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan				18 Jenis	-	-	18 Jenis	-	-	100%	-	-	



Adapun capaian kinerja pelayanan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.8.
Capaian Kinerja Pelayanan
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Tugas dan Fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	Urusan	SPM/ Standar Nasional	IKK	2022	2023	
				Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Urusan Komunikasi dan Informatika		IKK Outcome 1			
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100% (70 OPD)	100% (70 OPD)	100% (70 OPD)
			IKK Output :			
			1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100% (70 OPD)	100% (70 OPD)	100% (70 OPD)
			2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100% (70 OPD)	100% (70 OPD)	100% (70 OPD)
			3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada	Ada	Ada
			IKK Outcome 2			
			Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100% (6 layanan)	100% (6 layanan)	100% (6 layanan)
			IKK Output :			
			1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan	100% (571 kali)	100% (222 kali)	100% (222 kali)

No	Urusan	SPM/ Standar Nasional	IKK	2022	2023	
				Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
			pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015			
			2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100% (70 OPD)	100% (70 OPD)	100% (70 OPD)
			3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100% (70 OPD)	100% (70 OPD)	100% (70 OPD)
			4. Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100% (16 layanan)	100% (16 layanan)	100% (16 layanan)
			5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100% (4 layanan)	100% (3 layanan)	100% (3 layanan)
			6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100% (94 aplikasi)	100% (210 aplikasi)	100% (210 aplikasi)
			7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100% (8 aplikasi)	100% (8 aplikasi)	100% (8 aplikasi)
			8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100% (70 OPD)	100% (70 OPD)	100% (70 OPD)



No	Urusan	SPM/ Standar Nasional	IKK	2022	2023	
				Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
			9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100% (70 OPD)	100% (70 OPD)	100% (70 OPD)
			10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100% (70 OPD)	100% (70 OPD)	100% (70 OPD)
			11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	100% (40 sektor)	100% (40 sektor)	100% (40 sektor)
			12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100% (70 OPD)	100% (70 OPD)	100% (70 OPD)
			13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100% (8 Orang)	100% (9 Orang)	100% (9 Orang)
			14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada	Ada	Ada
			IKK Outcome 3			
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100% (1.051.344 orang)	100% (1.040.570 orang)	100% (1.040.570 orang)
			IKK Output :			
			1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	100% (16 mitra)	100% (18 mitra)	100% (18 mitra)
			2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan	100% (1495 konten)	100% (2339 konten)	100% (2339 konten)

No	Urusan	SPM/ Standar Nasional	IKK	2022	2023	
				Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
			strategi komunikasi (STRAKOM)			
			3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan sop yang telah ditetapkan	100% (1495 konten)	100% (2339 konten)	100% (2339 konten)
2.	Urusan Statistik		IKK Outcome 1			
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100% (70 OPD)	100% (70 OPD)	100% (70 OPD)
			IKK Output :			
			2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	2 Survey	8 Survey	8 Survey
			3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 Kompilasi	1 Kompilasi	1 Kompilasi
			4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	2 Survey	8 Survey	8 Survey
			5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1 Kompilasi	1 Kompilasi	1 Kompilasi
			6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100% (10 Metadata)	100% (11 Metadata)	100% (11 Metadata)
			7. Persentase kelengkapan metadata variable sektoral	100% (10 Metadata)	100% (11 Metadata)	100% (11 Metadata)
			IKK Outcome 2			
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100% (70 OPD)	100% (70 OPD)	100% (70 OPD)
3.	Urusan Persandian		IKK Outcome 1			
			Tingkat keamanan informasi pemerintah kabupaten bojonegoro	80,62% (520)	80,62% (520)	80,62% (520)
			IKK Output :			

No	Urusan	SPM/ Standar Nasional	IKK	2022	2023	
				Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
			1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100% (1 Kegiatan)	100% (116 Kegiatan)	100% (116 Kegiatan)
			2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	87,23% (82 aplikasi)	100% (120 aplikasi)	100% (120 aplikasi)
			3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100% (4 aplikasi)	100% (28 aplikasi)	100% (28 aplikasi)
			4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100% (1 titik)	100% (1 titik)	100% (1 titik)



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Uraian dari isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro antara lain:

1. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD

Layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Perangkat Daerah yang meliputi 3 Sasaran yakni Sasaran 1 - Meningkatnya Implementasi SPBE pada Perangkat Daerah, Sasaran 2 - Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektorial pada Portal Satu Data dan Sasaran 3 - Meningkatnya Keamanan Informasi. Capaian Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 secara umum dapat tercapai dengan tingkat kinerja rata-rata sangat tinggi. Adapun hal kritis terkait pelayanan PD antara lain:

- a. Untuk publikasi melalui media cetak, media luar ruang, media online/cyber, dan media elektronik penambahan volume berpengaruh pada kebutuhan penambahan anggaran.
- b. Diperlukan peningkatan dalam penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK;
- c. Diperlukan penerapan SLA (Service Level Agreement) untuk layanan IT;
- d. Diperlukan peningkatan kompetensi dan sertifikasi ASN di bidang TIK;
- e. Diperlukan penerapan manajemen risiko SPBE untuk meminimalisir risiko negatif dan memanfaatkan risiko positif untuk memberikan peluang keberhasilan pencapaian tujuan penerapan SPBE.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi



SDM dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran yang cukup memadai, sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Aplikasi yang dikembangkan secara mandiri oleh OPD dengan bekerjasama dengan developer dari sisi keamanan masih rentan, sekaligus sulit diintegrasikan dengan aplikasi lain;
2. Belum semua komputer/laptop di semua OPD aman dari virus serta *malware* karena belum adanya aplikasi *antivirus* yang terinstal pada komputer tersebut;
3. Belum optimalnya kemampuan dan prasarana TIK masyarakat khususnya dalam memilah informasi;

Selain permasalahan yang ada terdapat hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD antara lain:

1. Bentang geografis Kabupaten Bojonegoro yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakatnya;
2. Integrasi sistem aplikasi dalam penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Bojonegoro, terhadap capaian program nasional/internasional

Dengan adanya permasalahan dan hambatan serta tingkat kinerja layanan PD, mempunyai dampak sebagai berikut:

- a) Terhadap visi dan misi Kepada Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan misi **kedua** yaitu ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab”*** dan sekaligus melaksanakan program unggulan ke-14 yaitu ***“Bojonegoro Green dan Smart City”***.
- b) Terhadap capaian program nasional
Secara nasional Standard Pelayanan Minimal (SPM) bidang Komunikasi dan Informatika berakhir sampai tahun 2014, yang



selanjutnya hanya ada 6 (Enam) SPM dan bidang Komunikasi dan Informatika tidak termasuk didalamnya.

Indikator kinerja disusun sesuai dengan kondisi Kab/Kota Masing masing, sehingga tiap daerah berbeda.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD

Tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah :

- a) Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
- b) Kebebasan penggunaan media sosial
- c) Pesatnya perkembangan TIK
- d) Kesenjangan informasi dan kemampuan TIK masyarakat
- e) Ketersediaan Infrastruktur teknologi informasi yang belum merata
- f) Peretasan sistem informasi dan gangguan keamanan informasi
- g) Distribusi dan integrasi aplikasi dalam menerapkan *e-government* menuju optimalisasi interoperabilitas
- h) Kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi
- i) Belum adanya *Disaster Recovery Plan* dan Jaminan keamanan sistem informasi pada instansi Pemerintah
- j) Penyediaan data daerah dan statistik sektoral yang akurat dan akuntabel belum optimal.

Sedangkan peluang yang dapat diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

- a) Komitmen Pemerintah Daerah dalam pengembangan TIK;
- b) Regulasi/peraturan perundangan yang mendukung pengembangan komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan *Open Source*;
- c) Ditetapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;



- d) Ditetapkannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Permandagri Nomor 98 Tahun 2018 sebagai landasan pengelolaan Big Data;
- e) Terpilih sebagai Kota/Kabupaten terbaik untuk Dimensi Smart Governance pada Gerakan Menuju 100 *Smart City* 2021;
- f) Diperolehnya Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Kepada 10 Desa Terbaik Se-Indonesia
- g) Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang *Masterplan Smart City*;
- h) Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- i) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan akses pelayanan;
- j) Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi informasi yang ada di masyarakat dan partisipasi pemanfaatannya;
- k) Berkembangnya Lembaga atau institusi pendidikan di Kabupaten Bojonegoro yang bergerak di bidang teknologi informasi dan telematika;
- l) Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk didayagunakan;
- m) Partisipasi masyarakat pada pelatihan di bidang TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM;
- n) Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- k) Penerapan fungsi *Government Public Relation* (GPR);
- l) Kebutuhan penguatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- m) Penyelenggaraan statistik sektoral secara mandiri;
- n) Penyelenggaraan persandian berbasis TIK untuk keamanan informasi;



- o) Sarana dan prasarana komunikasi internal penunjang operasional pemerintah;
- p) Komitmen semua unsur Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas.

5. Formulasi isi-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja lainnya;
- b) Review Masterplan Smart City dan Review Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
- c) Implementasi *Smart City* pada semua perangkat daerah dan unit kerja lainnya yang melibatkan semua pemangku kepentingan;
- d) Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bojonegoro dan Penetapan Daftar Data;
- e) Tuntutan publik akan keterbukaan informasi dan kecepatan arus informasi
- f) Penguatan kerjasama dengan *stakeholder* untuk pengelolaan komunikasi publik;
- g) Peningkatan SDM pegawai dan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika;
- h) Memperkuat regulasi komunikasi dan tata kelola TIK untuk mewujudkan sinergitas media komunikasi;
- i) Mengembangkan perangkat teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan SKPD dan masyarakat;
- j) Mengoptimalkan keamanan informasi dan persandian untuk meminimalkan kerusakan data dari kejahatan dunia maya melalui Implementasi ISO 27001 pada pusat data;
- k) Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.





2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari hasil analisis kebutuhan, tidak terdapat perbedaan dengan Rancangan awal RKPD. Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 secara detail dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9
Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro

Kode	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				22.772.702.698	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				22.772.702.698	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				22.175.786.698	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				22.175.786.698	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang sesuai Pedoman	100%	7.682.696.178	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang sesuai Pedoman	100%	7.682.696.178	
			Persentase Layanan Administrasi Umum, Administrasi Kepegawaian, Administrasi BMD dan Administrasi Keuangan sesuai SOP	100%				Persentase Layanan Administrasi Umum, Administrasi Kepegawaian, Administrasi BMD dan Administrasi Keuangan sesuai SOP	100%		
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang sesuai pedoman	18 Dokumen	104.221.710	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang sesuai pedoman	18 Dokumen	104.221.710	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	22.994.210	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	22.994.210	

Kode	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-OPD	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.152.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-OPD	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.152.000	
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	899.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	899.000	
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	275.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	275.000	
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-OPD	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	306.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-OPD	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	306.000	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Kab. Bojonegoro	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7.258.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Kab. Bojonegoro	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7.258.300	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bojonegoro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	68.337.200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bojonegoro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	68.337.200	

Kode	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Keuangan sesuai SOP	3 Layanan	6.377.681.589	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Keuangan sesuai SOP	3 layanan	6.377.681.589	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bojonegoro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	6.109.357.789	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bojonegoro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	6.109.357.789	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	285 Dokumen	264.064.300	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	285 Dokumen	264.064.300	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bojonegoro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	4.259.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bojonegoro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	4.259.500	
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Rekonsiliasi BMD dalam satu tahun	4 Dokumen	13.469.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Rekonsiliasi BMD dalam satu tahun	4 Dokumen	13.469.000	
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bojonegoro	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	13.469.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bojonegoro	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	13.469.000	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	5 Layanan	187.248.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	5 Layanan	187.248.500	

Kode	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	4.448.500	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	4.448.500	
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bojonegoro	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 Orang	182.800.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bojonegoro	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 Orang	182.800.000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum yang tercukupi	7 Layanan	398.642.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum yang tercukupi	7 Layanan	398.642.800	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bojonegoro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.991.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bojonegoro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.991.800	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bojonegoro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	58.202.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bojonegoro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	58.202.800	
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bojonegoro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11.067.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bojonegoro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11.067.500	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bojonegoro	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.780.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bojonegoro	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.780.400	

Kode	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	45.287.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	45.287.000	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bojonegoro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	15.258.300	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bojonegoro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	15.258.300	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Kab. Bojonegoro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	259.055.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Kab. Bojonegoro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	259.055.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Layanan Penunjang Urusan PD yang disediakan	3 Layanan	394.060.490	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Layanan Penunjang Urusan PD yang disediakan	3 Layanan	394.060.490	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bojonegoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.248.400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bojonegoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.248.400	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bojonegoro	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan	172.407.742	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bojonegoro	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan	172.407.742	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bojonegoro	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	14 Laporan	217.404.348	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bojonegoro	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	14 Laporan	217.404.348	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Layanan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD yang terpenuhi	3 Layanan	207.372.089	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Layanan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD yang terpenuhi	3 Layanan	207.372.089	

Kode	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bojonegoro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 Unit	152.796.089	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bojonegoro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 Unit	152.796.089	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bojonegoro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	16.160.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bojonegoro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	16.160.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bojonegoro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	38.416.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bojonegoro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	38.416.000	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Cakupan publikasi informasi melalui media cetak dan media elektronik	80%	9.706.295.670	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Cakupan publikasi informasi melalui media cetak dan media elektronik	80%	9.706.295.670	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Publikasi Informasi Publik yang Disebarluaskan Kepada Masyarakat	1000 Publikasi	9.706.295.670	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Publikasi Informasi Publik yang Disebarluaskan Kepada Masyarakat	1000 Publikasi	9.706.295.670	
			Jumlah pengaduan dan aspirasi publik yang ditindaklanjuti sesuai SOP	120 Pengaduan				Jumlah pengaduan dan aspirasi publik yang ditindaklanjuti sesuai SOP	120 Pengaduan		
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	1.596.535.900	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	1.596.535.900	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	1.813.675.500	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	1.813.675.500	

Kode	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	45 Dokumen	1.639.424.650	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	45 Dokumen	1.639.424.650	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Bojonegoro	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	300 Orang	1.114.308.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Bojonegoro	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	300 Orang	1.114.308.000	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	10 Dokumen	510.185.320	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	10 Dokumen	510.185.320	
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bojonegoro	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18 Unit	3.032.166.300	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bojonegoro	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18 Unit	3.032.166.300	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Cakupan pemanfaatan aplikasi informatika oleh Perangkat Daerah	100%	4.786.794.850	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Cakupan pemanfaatan aplikasi informatika oleh Perangkat Daerah	100%	4.786.794.850	
			Persentase Jaminan Kualitas Layanan TIK (Service Level Agreement)	73%				Persentase Jaminan Kualitas Layanan TIK (Service Level Agreement)	73%		
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang telah Mengelola Sub Domain sesuai dengan Permen Kominfo	70 OPD	2.912.408.700	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang telah Mengelola Sub Domain sesuai dengan Permen Kominfo	70 OPD	2.912.408.700	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Bojonegoro	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	70 Unit	2.912.408.700	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Bojonegoro	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	70 Unit	2.912.408.700	

Kode	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang terlayani Pusat Data	73 OPD	1.874.386.150	Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang terlayani Pusat Data	73 OPD	1.874.386.150	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Mandiri SPBE	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Evaluasi Mandiri SPBE	1 Dokumen		
			Jumlah Sistem Informasi yang diintegrasikan	1 Layanan				Jumlah Sistem Informasi yang diintegrasikan	1 Layanan		
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	569.683.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	569.683.000	
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	12 Dokumen	50.519.000	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	12 Dokumen	50.519.000	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Bojonegoro	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	499.403.800	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Bojonegoro	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	499.403.800	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kab. Bojonegoro	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	233.173.950	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kab. Bojonegoro	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	233.173.950	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	188.819.500	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	188.819.500	

Kode	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	332.786.900	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	332.786.900	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				195.008.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				195.008.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data	100%	195.008.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data	100%	195.008.000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan Sesuai Standar Data	400 Data	195.008.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan Sesuai Standar Data	400 Data	195.008.000	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	195.008.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Bojonegoro	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	195.008.000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				401.908.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				401.908.000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Cakupan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	65%	401.908.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Cakupan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	65%	401.908.000	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PD yang Telah Menggunakan Layanan Persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	70 OPD	401.908.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PD yang Telah Menggunakan Layanan Persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	70 OPD	401.908.000	

Kode	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bojonegoro	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	37.763.900	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bojonegoro	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	37.763.900	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bojonegoro	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	70 Perangkat Daerah	364.144.100	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bojonegoro	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	70 Perangkat Daerah	364.144.100	

Berdasarkan Tabel 2.9 diatas dapat dijelaskan bahwa setelah dilakukan review terhadap RKPD antara RKPD dengan analisis kebutuhan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika telah sesuai.



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro yang langsung ditujukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan yang diperoleh tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2024 tidak ada/nihil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.10.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH



3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro mempunyai hubungan fungsional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 bahwa sasaran, arah kebijakan dan strategi nasional bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

a. Sasaran dan Arah Kebijakan Nasional

Tabel 3.1.
Sasaran dan Arah Kebijakan Nasional

	Indonesia Digital	Pemerintah Digital
Sasaran Transformasi Digital	- Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur dengan bantuan teknologi digital. 5 fokus pembangunan yaitu manusia, ekonomi, wilayah, infrastruktur, dan polhukhanham. - Antara lain pada layanan kesehatan dan pendidikan, layanan keuangan (fintech), layanan pemerintah (digital government), layanan mobilitas, pembangunan rendah karbon, infrastruktur generasi digital, kerjasama pemerintah dan badan usaha, smart city, smart agriculture. - Lingkungan yang cocok untuk mengembangkan bisnis dan R&D.	- Penggunaan teknologi digital untuk memberikan kebijakan yang lebih responsif dan layanan yang lebih baik. - Bagi masyarakat dan bisnis, ini berarti fleksibilitas yang lebih besar (tidak kaku), cara yang lebih sederhana bila berurusan dengan pemerintah. - Layanan tidak hanya sekedar tersedia <i>online</i>, tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisnis (berdasarkan <i>Big Data</i>). Layanan lebih bersifat pribadi, terfokus.
Arah Kebijakan	- Meembangkan kondisi yang mendorong pengembangan penyediaan layanan digital seperti pengembangan kapasitas SDM, teknologi, R&D, infrastruktur dan menetapkan peraturan dan lembaga yang mendukung. - Mengidentifikasi pemenuhan layanan digital dan mengintegrasikan sistem transformasi digital secara nasional - Mengembangkan kemampuan dalam pengelolaan Big Data	

	Memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat
--	---

b. Strategi Nasional

Tabel 3.2.
Strategi Nasional

Strategi Transformasi Digital	Penyiapan Layanan Digital (Enabling Environment)	Pemenuhan Layanan Digital	Pengelolaan Big Data
	- Menyiapkan aturan perundangan tentang Transformasi Digital - Menyiapkan Lembaga yang khusus mengkoordinasikan Pelaksanaan Transformasi Digital yaitu Dewan Transformasi Digital - Membangun jaringan dan infrastruktur pendukung - Membangun sistem pendidikan melek digital - Meningkatkan kapasitas SDM dalam keahlian digital - Melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam penyediaan layanan digital	- Menerapkan aturan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - Inventarisasi layanan pemerintah untuk pengembangan layanan digital - Integrasi semua sistem digital yang ada di pemerintahan ke dalam satu sistem - Melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam pemenuhan layanan digital	- Meneliti sumber-sumber Big Data baik yang disediakan oleh layanan pemerintah maupun swasta - Membangun sumber-sumber Big Data - Mengembangkan kemampuan Analisa Big Data - Mengembangkan sistem pembuatan keputusan di berbagai level birokrasi - Menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi dan badan usaha

c. Program Prioritas Nasional

Tabel 3.3.
Program Prioritas Nasional

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
PP. Transformasi Digital			
	1. Terbangunnya ekosistem dan pemanfaatan TIK 2. Tersedianya layanan akses infrastruktur TIK	1. Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi 2. Persentase pengguna internet 3. Proporsi jumlah pelanggan <i>fixed broadband</i> 4. Proporsi populasi yang dijangkau <i>mobile broadband</i>	

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
		5. Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	
KP 1. Penuntasan infrastruktur TIK	Meratanya akses layanan telekomunikasi dan internet di desa	1. Persentase desa <i>blank spot</i> yang mendapatkan layanan telekomunikasi 2. Persentase penyediaan satelit multifungsi 3. Persentase jangkauan infrastruktur jaringan serat optik hingga kecamatan 4. Kecepatan internet kabel (<i>fixed broadband</i>) dan kecepatan internet seluler (<i>mobile broadband</i>) (Mbps) 5. Persentase terlaksananya penyiaran digital melalui <i>Analog Switch Off</i>	1. Pengembangan infrastruktur pitalebar 2. Pengembangan infrastruktur penyiaran 3. Pengembangan infrastruktur TIK pemerintahan
KP 2. Pemanfaatan infrastruktur TIK	1. Meningkatnya pemanfaatan akses telekomunikasi dan internet 2. Optimalisasi pemanfaatan TIK untuk sektor pertumbuhan ekonomi strategis	1. Persentase puskesmas yang terlayani akses telekomunikasi 2. Persentase puskesmas yang terlayani akses telekomunikasi 3. Jumlah petani dan nelayan yang bermitra dengan layanan <i>online</i> (orang) – kumulatif 4. Persentase keterpaduan aplikasi umum SPBE 5. Persentase sekolah (SMA dan SMK) yang terlayani akses telekomunikasi	1. Pemanfaatan TIK layanan pemerintah 2. Pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha
KP 3. Fasilitas pendukung transformasi digital	Meningkatnya daya saing industri dan SDM TIK dalam negeri	1. Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kapasitas menghadapi transformasi digital 2. Jumlah UMKM yang menjalani bisnis <i>online</i> yang mendapatkan peningkatan kapasitas 3. Persentase integrasi data pemerintah 4. Persentase pengembangan platform <i>Big Data</i> Nasional	1. Pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi 2. Pengembangan literasi dan keahlian TIK 3. Pengembangan dan fasilitasi industri TIK

Mengacu pada sasaran, arah kebijakan dan strategi nasional program tersebut diatas pada dasarnya terdapat keselarasan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan permasalahan yang akan di tuntaskan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik masih diperlukan integrasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah yaitu:

1. Mengoptimalkan informasi edukatif yang sampai ke masyarakat;
2. Meningkatkan transparansi informasi dari badan publik kepada masyarakat;
3. Meningkatkan ketersediaan sistem jaringan komunikasi secara merata;
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi secara cepat dan handal;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi sebagai hak masyarakat;
6. Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis teknologi informasi;
7. Menyusun pedoman layanan informasi dan komunikasi publik;
8. Melibatkan kelompok informasi masyarakat dalam rangka penyebarluasan (diseminasi) informasi;

3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, sasaran jangka menengah rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, implikasi rencana tata ruang dan wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis dapat teridentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada



- Perangkat Daerah dan Unit Kerja lainnya;
- b. Review Masterplan Smart City dan Review Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
 - c. Implementasi *Smart City* pada semua perangkat daerah dan unit kerja lainnya yang melibatkan semua pemangku kepentingan;
 - d. Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bojonegoro dan Penetapan Daftar Data;
 - e. Tuntutan publik akan keterbukaan informasi dan kecepatan arus informasi
 - f. Penguatan kerjasama dengan *stakeholder* untuk pengelolaan komunikasi publik;
 - g. Peningkatan SDM pegawai dan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika;
 - h. Memperkuat regulasi komunikasi dan tata kelola TIK untuk mewujudkan sinergitas media komunikasi;
 - i. Mengembangkan perangkat teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan SKPD dan masyarakat;
 - j. Mengoptimalkan keamanan informasi dan persandian untuk meminimalkan kerusakan data dari kejahatan dunia maya melalui Implementasi ISO 27001 pada pusat data;
 - k. Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Memperhatikan Evaluasi Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET 2024
Tujuan :		
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam transparansi, akses informasi dan layanan publik	Indeks SPBE	3,00 (Baik)
Sasaran :		
1. Meningkatnya layanan bidang teknologi informasi dan komunikasi publik	1. Indeks Domain Kebijakan SPBE	3,60
	2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2,60
	3. Indeks Domain Manajemen SPBE	1,91
	4. Indeks Domain Layanan SPBE	3,43
2. Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral pada Portal Satu Data	Laju pemanfaatan data statistik sektoral pada Portal Satu Data	5,25%
3. Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Indeks KAMI	521
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	88,62
	2. Nilai IKM Dinas Komunikasi dan Informatika	3,65

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN



4.1. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 mencakup 3 (tiga) urusan, 5 (lima) Program, 12 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan, yaitu:

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, meliputi:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, meliputi kegiatan:

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri atas sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri atas sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri atas sub kegiatan:
 - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri atas sub kegiatan :

- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri atas sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik, meliputi kegiatan:

- 2.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - b. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - c. Pelayanan Informasi Publik
 - d. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas



- f. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Aplikasi Informatika, meliputi kegiatan:

- 3.1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- 3.2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - b. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
 - d. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - e. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - f. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, meliputi:

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, meliputi kegiatan :

- 4.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, meliputi:

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, meliputi kegiatan:

- 5.1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



b. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dari program dan kegiatan tersebut diatas faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung Tujuan kedua RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 yaitu ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan inovatif”*** dan sasaran ***“Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah”*** dengan indikator sasaran ***“Indeks SPBE”***.

Rumusan rencana program dan kegiatan PD Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 Kabupaten Bojonegoro pada Dinas Komunikasi dan Informatika pKabupaten Bojonegoro secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.1 berikut :



Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Bojonegoro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				22.772.702.698				15.816.987.658
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				22.175.786.698				14.969.338.658
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang sesuai Pedoman		100%	7.682.696.178			100%	7.202.467.608
		Persentase Layanan Administrasi Umum, Administrasi Kepegawaian, Administrasi BMD dan Administrasi Keuangan sesuai SOP		100%				100%	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang sesuai pedoman		18 Dokumen	104.221.710			18 Dokumen	45.509.837
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bojonegoro	7 Dokumen	22.994.210	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		7 Dokumen	19.193.987
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-OPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bojonegoro	1 Dokumen	4.152.000	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	4.152.000
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bojonegoro	1 Dokumen	899.000	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	899.000
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bojonegoro	1 Dokumen	275.000	Dana Umum - Dana Transfer		1 Dokumen	255.300

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Umum - Dana Bagi Hasil			
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-OPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bojonegoro	1 Dokumen	306.000	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	306.000
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bojonegoro	3 Laporan	7.258.300	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		16 Laporan	6.883.300
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bojonegoro	16 Laporan	68.337.200	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Laporan	13.820.250
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan sesuai SOP		3 Layanan	6.377.681.589			3 Layanan	6.323.521.500
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bojonegoro	36 Orang	6.109.357.789	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum; Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		36 Orang	6.062.650.000
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bojonegoro	285 Dokumen	264.064.300	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		285 Dokumen	256.612.000
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bojonegoro	5 Laporan	4.259.500	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 Laporan	4.259.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rekonsiliasi BMD dalam satu tahun		4 Dokumen	13.469.000			4 Kali	13.469.000
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bojonegoro	4 Laporan	13.469.000	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		20 Laporan	13.469.000
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP		5 Layanan	187.248.500			5 Layanan	14.470.000
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bojonegoro	12 Dokumen	4.448.500	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	3.970.000
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bojonegoro	56 Orang	182.800.000	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Orang	10.500.000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang tercukupi		7 Layanan	398.642.800			7 Layanan	244.706.200
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bojonegoro	1 Paket	4.991.800	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Paket	4.991.850
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bojonegoro	3 Paket	58.202.800	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Paket	4.730.150
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bojonegoro	1 Paket	11.067.500	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Paket	9.036.000
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bojonegoro	1 Paket	4.780.400	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Paket	6.605.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bojonegoro	360 Dokumen	45.287.000	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		300 Eksemplar	43.534.500
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bojonegoro	6 Laporan	15.258.300	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4 laporan	13.652.700
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bojonegoro	24 Laporan	259.055.000	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		24 Laporan	162.156.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Penunjang Urusan PD yang disediakan		3 Layanan	394.060.490			3 Layanan	405.173.071
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bojonegoro	12 Laporan	4.248.400	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Laporan	4.248.400
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bojonegoro	13 Laporan	172.407.742	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		13 Laporan	140.609.119
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Bojonegoro	14 Laporan	217.404.348	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		14 Laporan	260.315.552
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD yang terpenuhi		3 Layanan	207.372.089			2 Layanan	155.618.000
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Bojonegoro	24 Unit	152.796.089	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		24 Unit	140.204.000
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bojonegoro	8 Unit	16.160.000	Dana Umum - Dana Transfer		8 Unit	15.414.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Umum - Dana Bagi Hasil			
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bojonegoro	1 Unit	38.416.000	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		-	-
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan publikasi informasi melalui media cetak dan media elektronik		80%	9.706.295.670			85%	2.409.436.000
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Publikasi Informasi Publik yang Disebarluaskan Kepada Masyarakat		1000 Publikasi	9.706.295.670			250 Publikasi	2.409.436.000
				120 Pengaduan					
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bojonegoro	12 Dokumen	1.596.535.900	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	362.360.900
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bojonegoro	12 Dokumen	1.813.675.500	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	376.548.450
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab. Bojonegoro	45 Dokumen	1.639.424.650	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		20 Dokumen	731.090.650
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Bojonegoro	300 Orang	1.114.308.000	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 Orang	298.056.000
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kab. Bojonegoro	10 Dokumen	510.185.320	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Dokumen	70.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bojonegoro	18 Unit	3.032.166.300	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		18 Unit	571.380.000
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan pemanfaatan aplikasi informatika oleh Perangkat Daerah		100%	4.786.794.850			100%	5.357.435.050
		Persentase Jaminan Kualitas Layanan TIK (Service Level Agreement)		73%				75%	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah Mengelola Sub Domain sesuai dengan Permen Kominfo		70 OPD	2.912.408.700			70 OPD	2.912.408.700
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Bojonegoro	70 Unit	2.912.408.700	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		70 Unit	2.912.408.700
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah Mengelola e-Government		73 OPD	1.874.386.150			70 OPD	2.445.026.350
				1 Dokumen					
				1 Layanan					
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Dinas Kominfo	2 Unit	569.683.000	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Unit	888.167.000
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kab. Bojonegoro	12 Dokumen	50.519.000	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	53.045.000
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab. Bojonegoro	3 Unit	499.403.800	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Aplikasi	613.306.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Bojonegoro	1 Layanan	233.173.950	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Layanan	147.101.950
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Kab. Bojonegoro	1 Dokumen	188.819.500	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	278.819.500
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Kab. Bojonegoro	1 Dokumen	332.786.900	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	464.586.900
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				195.008.000				245.741.000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data		100%	195.008.000			100%	245.741.000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan Sesuai Standar Data		400 Data	195.008.000			450 Data	245.741.000
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Bojonegoro	3 Dokumen	195.008.000	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Dokumen	245.741.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				401.908.000				601.908.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah		65%	401.908.000			68%	601.908.000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang Telah Menggunakan Layanan Persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		70 OPD	401.908.000			70 OPD	601.908.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bojonegoro	1 Laporan	37.763.900	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	37.763.900
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab. Bojonegoro	70 Perangkat Daerah	364.144.100,00	Dana Umum - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		70 Perangkat Daerah	564.144.100



BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025, RPJM Provinsi Jawa Timur, RPJPD dan RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan OPD Tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja-PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Akhirnya dengan segala kemampuan yang ada, kami bertekad untuk mewujudkan Perubahan Renja-PD Tahun 2024 ini sebagai sumbangsih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabupaten Bojonegoro pada umumnya.

Bojonegoro, 20 September 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO



SISWOYO, S.Pt.,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19760527 200112 1 004